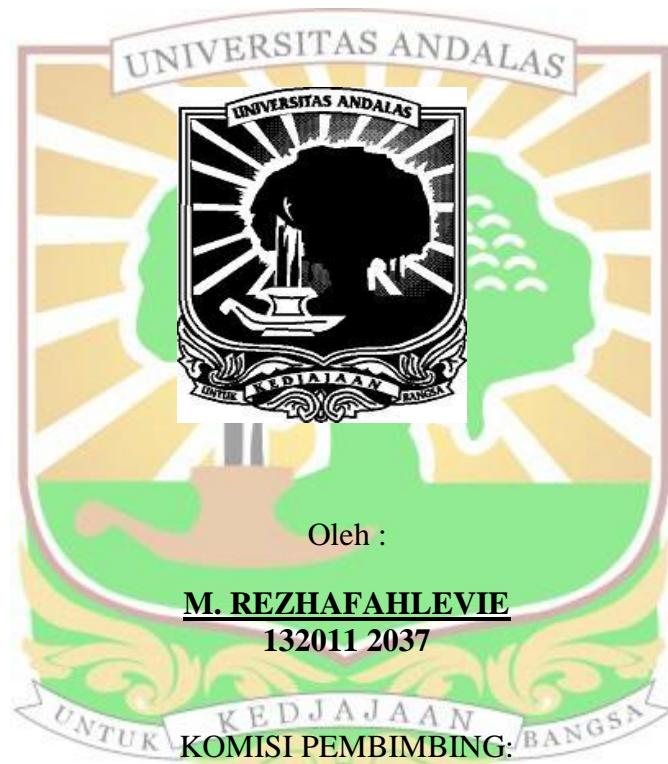


**PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2009-2014  
KARENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN**

**TESIS**

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

**M. REZHAFHLEVIE**

**132011 2037**

**KOMISI PEMBIMBING:**

Prof.Dr. YULIANDRI, S.H.,M.H

Dr. YUSLIM, S.H.,M.H

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

# **PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2009-2014 KARENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN**

(M. Rezha Fahlevie, 1320112037, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana  
Universitas Andalas, Magister Ilmu Hukum, Halaman 115, 2017)

## **ABSTRAK**

Partai Politik sebagai pilar demokrasi adalah dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Dimana partai politik sebagai unsur pembentuk lembaga legislatif. Untuk ikut dalam pemilihan umum, partai politik harus melewati verifikasi tanpa memandang apakah partai itu partai peserta Pemilu sebelumnya atau partai politik dimaksud telah turut menempatkan wakilnya sebagai anggota DPRD. Keikutsertaan kembali beberapa anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pemilihan calon DPRD 2014-2019 mengharuskan anggota DPRD yang bukan berasal dari partai politik peserta Pemilu harus mengundurkan diri karena pindah partai ke partai politik peserta Pemilu legislatif tahun 2014-2019. Dimana mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini meneliti bagaimana proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain dan bagaimana pengisian kembali keterwakilan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang diberhentikan karena menjadi partai politik lain dengan metode socio-legal research. Perpindahan keanggotaan partai politik mengakibatkan resiko konsekuensi pemberhentiannya sebagai anggota partai politik, yang diikuti pula dengan pemberhentian sebagai anggota DPRD. Pemberhentian sebagaimana dimaksud mengharuskan adanya usulan partai politik. Bubarnya partai politik yang bersangkutan dan adanya keengganan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum untuk melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu. Surat Menteri Dalam Negeri yang memperlonggar keharusan adanya usulan partai politik menjadi faktor proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD. Terhadap pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang diberhentikan, dimana tidak terdapat calon penggantinya, mengakibatkan pengisiannya tidak didasarkan pada PP 16 Tahun 2010. Oleh karenanya terhadap anggota DPRD yang telah diberhentikan kembali dilakukan mekanisme pengaktifan kembali.

Kata kunci : Pemberhentian Antarwaktu, DPRD, Partai Politik

**PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2009-2014 KARENA  
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN**

(M. Rezha Fahlevie, 1320112037, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana  
Universitas Andalas, Magister Ilmu Hukum, 115 Pages, 2017)

**ABSTRACT**

Political parties as a pillar of democracy is in order to realize a democratic political system in order to support an effective presidential system. Where a political party as an element of legislative establishment. To participate in a general election, a political party must pass verification regardless of whether the party is a party to the previous General Elections or the political party has contributed to its deputy as a member of the DPRD. The re-existence of several members of the Tanah Datar District House of Representatives in the 2014-2019 DPRD election requires that DPRD members who are not from political parties participating in the General Election should move parties to political parties participating in legislative elections in 2014-2019. Where intermittent and intertemporal dismissal mechanisms are regulated in several laws and regulations. This study examines how the process of dismissal of DPRD Tanah Datar members in terms of moving to other Political Party members and how to recharge the representation of DPRD Tanah Datar who was dismissed for being another political party with socio-legal research method. Movement of membership of political parties results in the consequences of dismissal as members of political parties, followed by dismissal as members of parliament. Such dismissal shall require the proposal of a political party. The dissolution of the political parties concerned and the reluctance of political parties to propose a dismissal, resulting in the absence of legal certainty to carry out intermittent stops and interchanges. The Letter of the Minister of Home Affairs which loses the necessity of the proposed political party to be a factor in the process of dismissal between members of the DPRD. Against the filling of DPRD Tanah Datar District members who are dismissed, where there is no replacement candidate, the result is not based on PP 16 of 2010. Therefore, to the re-dismissed DPRD members, the mechanism of reactivation is held.

Keyword : dismissal of parliamentarians, Political parties.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW selaku suri tauladan bagi kita dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat.

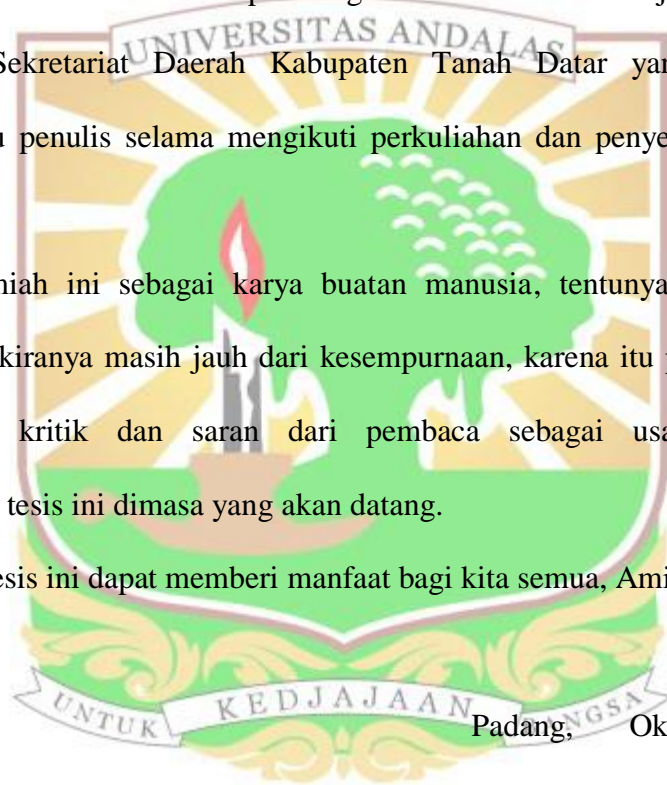
Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua, mertua, keluarga dan istri tercinta Elsa Betri, S.Pt serta kedua buah hati penulis : Mohammed El Fathansyah Fahlevie dan Mohammed El Ghifarysyah Fahlevie yang menjadi motivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana. Selanjutnya ucapan terima kasih teruntuk Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Yuslim, S.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih dan segala hormat penulis, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum., Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H., dan Bapak Charles Simabura, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III;
3. Ibu Dr. Khairani, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2013;
6. Pimpinan dan Staf Biro Tata Usaha Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Kepala Bagian dan rekan-rekan sejawat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penyelesaian penulisan tesis ini.

Karya ilmiah ini sebagai karya buatan manusia, tentunya tak lepas dari kekhilafan dan kiranya masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran dari pembaca sebagai usaha dan bentuk penyempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang.

Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, Amin.



Padang, Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	28

### BAB II. TINJAUAN PUSATAKA

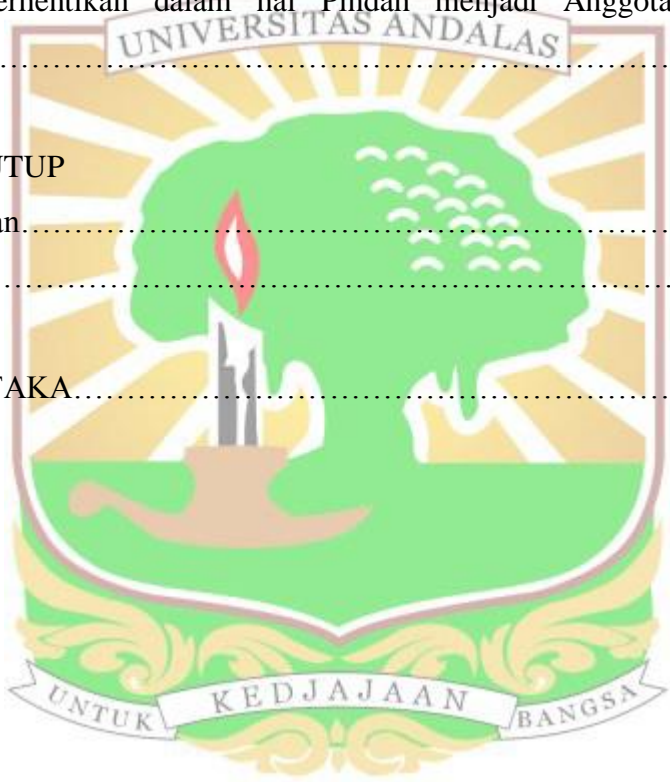
A. Partai Politik dan Tinjauan Kepartaian .....	
1. Defenisi Partai Politik.....	32
2. Fungsi Partai Politik.....	32
3. Klasifikasi Partai Politik.....	37
4. Tinjauan Kepartaian.....	40
B. Fungsi, Tugas dan Wewenang dan Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	43
C. Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten.....	46
D. Mekanisme Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten.....	53
	59

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2009-2014.....

B. Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal Pindah menjadi Anggota Partai Politik Lain..... 63

C. Pengisian Kembali Keterwakilan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah diberhentikan dalam hal Pindah menjadi Anggota Partai Politik Lain..... 73



95

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA..... 109

LAMPIRAN..... 111

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009.....	65
Tabel 2.	Jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar.....	66
Tabel 3.	Daftar Perolehan Suara Partai Bintang Reformasi pada masing-masing Dapil.....	67
Tabel 4.	Anggota DPRD Kabupaten Tanah periode 2009-2014.....	68
Tabel.5	Jumlah Anggota masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2014.....	70
Tabel.6	Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2014.....	70
Tabel.7	Komisi DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2014.....	71
Tabel.8	Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2014 .....	71
Tabel.9	Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2014 .....	72
Tabel.10	Jumlah Anggota masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2014.....	93
Tabel.11	Daftar Peringkat Perolehan Suara Partai Bintang Reformasi berdasarkan perolehan kursi.....	95



## DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 Bagan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang mengundurkan diri..... 94

Gambar .2 Bagan Proses Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang mengundurkan diri..... 105

